



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan.....	Rp. 5.249.017.754.255,86
b. belanja :	
1. belanja daerah....	Rp. 3.600.104.431.258,66
2. transfer.....	Rp. 1.820.829.098.044,87
surplus/defisit .....	Rp.(171.915.775.047,67)
c. pembiayaan:	
1. penerimaan.....	Rp. 674.677.370.022,76
2. pengeluaran.....	Rp. 50.000.000.000,00
surplus/defisit.....	Rp.624.677.370.022,76

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.30.905.118.514,13 (tiga puluh milyar sembilan ratus lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat belas, tiga belas per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 5.218.112.635.741,73
  - b. realisasi ..... Rp. 5.249.017.754.255,86
  - selisih lebih/(kurang) ..... Rp. (30.905.118.514,13)
  
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 395.398.130.908,79 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan, tujuh puluh sembilan per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan ..... Rp. 5.816.331.660.212,32
  - b. realisasi..... Rp. 5.420.933.529.303,53
  - selisih lebih/(kurang) ..... Rp. 395.398.130.908,79
  
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp.426.303.249.422,92) (empat ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua, sembilan puluh dua per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. setelah perubahan ..... Rp (598.219.024.470,59)
  - b. realisasi surplus (defisit)..... Rp. (171.915.775.047,67)
  - selisih lebih/(kurang) ..... Rp. (426.303.249.422,92)
  
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. setelah perubahan ..... Rp. 624.677.370.022,76
  - b. realisasi ..... Rp. 624.677.370.022,76
  - selisih lebih/(kurang) ..... Rp 0,00
  
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan kurang sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. setelah perubahan ..... Rp. 50.000.000.000,00
  - b. realisasi ..... Rp. 50.000.000.000,00
  - selisih lebih/(kurang) ..... Rp. 0,00
  
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. setelah perubahan..... Rp. 624.677.370.022,76
  - b. realisasi ..... Rp. 624.677.370.022,76
  - selisih lebih/(lurang) ..... Rp. 0,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp.	674.677.370.022,76
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar.....	Rp.	674.677.370.022,76
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	Rp.	452.761.594.975,09
Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp.	452.761.594.975,09

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. jumlah aset.....	Rp.	8.554.849.314.153,75
b. jumlah kewajiban .....	Rp.	343.771.210.737,83
c. jumlah ekuitas dana .....	Rp.	8.211.078.103.415,92

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

##### Kegiatan Operasional

a. jumlah pendapatan-LO.....	Rp.	5.153.677.672.532,18
b. jumlah beban-LO.....	Rp.	4.023.351.810.335,78
Surplus (Defisit) Operasi.....	Rp.	1.130.325.862.196,40

##### Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

a. Surplus Non Operasional.....	Rp.	0,00
b. Defisit Non Operasional.....	Rp.	0,00
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional.....	Rp.	0,00
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa.....	Rp.	1.130.325.862.196,40

##### Pos Luar Biasa

a. Jumlah Pendapatan Luar Biasa.....	Rp.	0,00
b. Jumlah Beban Luar Biasa.....	Rp.	10.289.390.178,13
Pos Luar Biasa .....	Rp.	(10.289.390.178,13)
Surplus (Defisit)-LO.....	Rp.	1.120.036.472.018,27

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2016...	Rp.	674.677.370.022,76
b. arus kas dari aktivitas operasi .....	Rp.	558.800.144.426,87
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan .....	Rp.	(780.715.919.474,54)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan .....	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran.....	Rp.	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2016 .....	Rp.	448.661.383.457,09

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Ekuitas awal.....	Rp.	5.369.807.024.618,95
Surplus (defisit)-LO.....	Rp.	1.120.036.472.018,27
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	Rp.	1.721.234.606.778,71
Ekuitas Akhir.....	Rp.	8.211.078.103.415,92

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih ;
- c. Lampiran III : laporan operasional ;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas ;
- e. Lampiran V : neraca ;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas ;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan ;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Agustus 2017

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 8

NO.REG.PERATURAN DAERAH BALI : 8/162/2017